**Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Kabupaten Jayapura.**

**I. PENDAHULUAN**

1.1 **Latar Belakang**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 sebagai perubahan dari UU No. 21 Tahun 2001, mengatur tentang kewenangan yang seimbang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Lambelanova, 2022). Inti dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 adalah terciptanya keseimbangan dalam kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Papua. Kebijakan otonomi khusus ini memberikan Provinsi Papua hak istimewa untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan inisiatif dan aspirasi masyarakat Papua berdasarkan hak-hak dasar mereka (Sutiyo et al., 2024). Otonomi Khusus juga merupakan langkah untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Papua dibandingkan dengan daerah otonom lainnya, dengan tujuan memberikan kebebasan lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), serta pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua (Nurfurqon, 2020).

Provinsi Papua terletak di ujung timur Indonesia, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memiliki keragaman suku bangsa serta lebih dari 250 bahasa daerah. Wilayah ini juga dihuni oleh berbagai suku lainnya di Indonesia. Saat ini, Provinsi Papua terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, yaitu: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong.

Reformasi di Indonesia memberikan peluang bagi munculnya pemikiran baru serta kesadaran kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan besar bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (Tanzi, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pernah menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua), sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999–2004 pada Bab IV huruf (g) angka 2. Selain itu, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Otonomi Khusus ini melalui pembentukan undang-undang khusus, yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat Papua.

Provinsi Papua masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan (Thahir, 2018). Letak geografis yang terpencil, wilayah yang luas dengan topografi pegunungan, menjadi hambatan utama dalam pembangunan serta pemerataan layanan dasar dan akses ke pusat-pusat ekonomi (Saputra, 2019). Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi turut menyulitkan mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penyumbang kemiskinan, mengingat masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan (Smith, 2020), yang berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, konflik sosial dan isu separatisme yang terjadi di wilayah ini semakin memperumit upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan dan kawasan terpadu, tantangan dari aspek geografis, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan yang memerlukan solusi menyeluruh.

Masalah kemiskinan di Papua bersifat turun-temurun dan sangat kompleks, dengan akar persoalan yang berasal dari sejarah kolonialisme, konflik berkepanjangan, hingga kurang optimalnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat asli Papua. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Schmidtz, 2023). Untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di Provinsi Papua secara lebih konkret, berikut ini disajikan data angka kemiskinan berdasarkan masing-masing kabupaten.

****

Berdasarkan data BPS tahun 2024 pada tabel diatas tingkat kemiskinan di papua masih jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi geografis yang menantang dengan wilayah yang luas dan terisolasi, serta infrastruktur yang terbatas, semakin memperparah situasi. Kabupaten Jayapura merupakan rumah bagi beragam suku bangsa asli Papua yang telah mendiami wilayah ini sejak zaman dahulu. Keberagaman suku di Kabupaten Jayapura tercermin dalam kekayaan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Beberapa suku asli

4

Mamberamo Tabi terlebih khusus di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain suku Sentani, Demta, Kaureh, Kemtuk, dan Nimboran. Setiap suku memiliki wilayah adat yang dikenal sebagai kampung yang menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Bagian dari rendahnya akses masyarakat tercermin dari layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan Listrik. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak merata dan tidak berkelanjutan telah menciptakan ketimpangan yang signifikan antara kelompok masyarakat, terutama antara masyarakat adat dan pendatang. Meningkatnya angka kemiskinan juga terjadi di saLah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura. Data tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antar distrik. Beberapa wilayah, seperti Kemtuk dan Demta, memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan distrik lainnya, seperti Jayapura Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lokal yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap distrik. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Jayapura masih menjadi tantangan yang serius. Meskipun terdapat beberapa distrik yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun secara umum, persentase penduduk miskin di wilayah ini masih tergolong tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap infrastruktur dasar, kualitas pendidikan, peluang kerja, serta kondisi geografis dan sosial budaya. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura, pemerintah Kabupaten Jayapura. Beberapa Program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Padat Karya, Program Pelatihan, Pemberian Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pemberian beasiswa program ini telah dijalankan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura, tetapi pada pelaksanaan program terdapat penghambat yakni akses penghubung, keterbatasan mengakses informasi mengenai otsus, dan yang menyebabkan program tersebut tidak dapat sampai pada masyarakat terlebih khusus Orang Asli Papua (Chauvel, 2019).

**1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun Otonomi Khusus telah memberikan kewenangan dan sumber daya finansial yang signifikan kepada Pemerintah Daerah Papua, masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana dana Otsus dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan, apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai, serta sejauh mana program-program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan. Analisis mendalam terhadap pola pengeluaran, transparansi anggaran, dan dampak langsung terhadap indikator kesejahteraan Orang Asli Papua dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas implementasi kebijakan Otsus dalam konteks pengentasan kemiskinan. Seringkali, program pengentasan kemiskinan dirancang dengan pendekatan top-down yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat (Turoldo, 2010). Penelitian dapat menggali sejauh mana kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dalam kerangka Otsus di Kabupaten Jayapura telah mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Orang Asli Papua. Ini termasuk analisis tentang bagaimana program-program tersebut mempertimbangkan sistem kepemilikan tanah adat, praktik ekonomi tradisional, dan struktur sosial masyarakat Papua. Eksplorasi terhadap potensi konflik antara modernisasi ekonomi dan pelestarian budaya, serta identifikasi strategi yang dapat menjembatani keduanya, dapat memberikan perspektif baru dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat lokal. Otonomi Khusus Papua mengakui keberadaan lembaga adat sebagai bagian integral

5

dari struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana lembaga adat dapat berperan efektif dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Penelitian dapat menganalisis kapasitas lembaga adat dalam mengelola dan mengawasi program-program pengentasan kemiskinan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penguatan peran mereka. Ini termasuk eksplorasi tentang bagaimana lembaga adat dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian program, serta peran mereka dalam memastikan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi Orang Asli Papua. Analisis komparatif antara daerah yang melibatkan lembaga adat secara aktif dengan yang tidak, dapat memberikan wawasan berharga tentang efektivitas pendekatan berbasis adat dalam pengentasan kemiskinan.

**1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik namun masih memiliki celah penelitian, Adapun seperti penelitian karya Tundiles Kogoya tahun 2023 berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua dengan hasil Program pelayanan kesehatan bagi Orang miskin dengan cara mengajak parsitipasi aktif dari masyarakat distrik nunggawi untuk mendukung program pelayanan ini yang telah berjalan meskipun masih mandek-mandek. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu kemampuan dari Pemerintah distrik dan pemerintah desa harus meningkatkan sumber daya menusia melalui pelatihan (Kogoya, 2023). Penelitian kedua karya Senas Alken Demtu tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) DAK bidang Pendidikan di kabupaten Jayapura dengan hasil Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Jayapura belum berjalan dengan baik (Demtu, 2021). Penelitian ketiga karya Edyanto tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dengan hasil menunjukkan bahwa ada empat faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur organisasi (Edyanto et al., 2021). Penelitian keempat karya Munanda Munanda, Alfi Rahman tahun 2023 berjudul Implementasi Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Aceh Utara, dengan hasil enelitian diketahui bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) berperan penting dalam meringankan beban masyarakat miskin, namun masih terdapat sejumlah tantangan (Munanda et al., 2023). Penelitian kelima karya Suharyo tahun 2016 berjudul Otonomi Khusus Di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat dengan hasil bahwa peraturan otonomi khusus yang dapat dikatakan sebagai produk hukum responsive dalam implementasinya masih menemukan banyak sekali kendala sehingga hasinya tidak maksimal (Suharyo, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dengan menghadirkan analisis mendalam dan holistik terhadap implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam konteks pengentasan kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura, menggunakan pendekatan kualitatif yang kaya akan nuansa lokal. Studi ini tidak hanya mengeksplorasi efektivitas kebijakan dari perspektif administratif, tetapi juga menggali dimensi sosio-kultural yang seringkali terabaikan dalam studi kebijakan publik konvensional. Dengan mengintegrasikan wawasan dari para pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh adat,

6

pejabat pemerintah, dan masyarakat asli Papua, penelitian ini menyoroti kompleksitas interaksi antara kebijakan modern dengan sistem nilai tradisional dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis kebijakan dengan etnografi, mengungkap bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat lokal membentuk dan dipengaruhi oleh implementasi Otonomi Khusus. Lebih jauh, studi ini mengembangkan kerangka analisis baru yang mempertimbangkan indikator kesejahteraan yang lebih kontekstual dengan budaya Papua, melampaui ukuran kemiskinan konvensional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur tentang kebijakan otonomi daerah dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang pembangunan yang berkeadilan dan berbasis budaya di wilayah dengan karakteristik unik seperti Papua. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas melihat penanganan kemiskinan dari segi otonomi khusus secara umum tanpa melihat faktor orang asli papua seperti pada penelitian (Vitara Agatha & Uliansyah, 2021)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam upaya mengurangi angka kemiskinan Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif dalam hal analisis pada implementasi kebijakan penurunan kemiskinan di Kabupaten Jayapura. Pendekatan ini dipilih dengan alas an flesibilitas dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan Ketika pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara kepadan informan tertentu yang dipilih oleh penulis. Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada subjek yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura, Adapun informan yang dipakai sejumlah 13 informan. Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, informan kunci adalah informan yang menurut spekulasi penulis memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik yang diangkat dalam penelitian (Simangunsong, 2017). Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi, angka, gambar, dan diagram, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini dilakukan selama satu bulan kotor di bulan Januari 2025, Adapun lokus penelitian ini adalah di lingkup Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. N. A., & Ichwan, S. (2023). Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Otonomi Khusus Di Kabupaten Sorong. Faksi, 9(3), 57–68. https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jf.v9i3.3184 Budiratna, H., & Qibthiyyah, R. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(3), 494. http://jiss.publikasiindonesia.id/ Chauvel, R. (2019). Governance and the Cycle of Violence in Papua: The Nduga Crisis. AsiaPacific Journal: Japan Focus, 17(2). Demtu, S. A. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Eprints.Ipdn, 21, 1–11. http://eprints.ipdn.ac.id/11337/1/Ringkasan Skripsi Senas Alken Demtu.pdf Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(4), 1445–1451. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577 Fardan, M. F. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendidikan, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Periode Tahun 2011-2017). Academia Edu, 2(7), 1–23. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96178899/MUHAMMAD\_FEISAL\_FARDA N-FEB-libre.pdf Kogoya, T., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Journal Governance, 3(1), 1–15. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/45923 Lambelanova, R. (2022). Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Buku Literatur IPDN Tahun 2022, 5(3), 248–253. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/863/1/PARADIGMA%20BARU%20DESENTRA LISASI%20ASIMETRIS%20DI%20INDONESIA%20FIX%202.pdf Munanda, Rahman, Alfi, dan Alqarni, Wais. (2023). Implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan pada masa pandemi covid-19 di Aceh Utara. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 8(2), 1–13. http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip%0AIMPLEMENTASI